

Gereja dan Partisipasi Politik

Abu Bakar & Muh. Wahyu
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
e-mail: abu.bakar@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Tulisan ini berusaha menjelaskan peran Gereja sebagai institusi agama di dalam mendorong partisipasi politik masyarakat di Kota Makassar. Untuk mengkerangkai tulisan ini menggunakan teori partisipasi politik dan menggunakan pendekatan kualitatif. Tulisan ini menjelaskan bahwa sekalipun Gereja Katolik tidak menyatakan sikap politik secara jelas dan berpihak kepada kandidat tertentu, akan tetapi upaya mereka terutama dari Komite Kepemudaan Keuskupan Agung Makassar yang mensosialisasikan pentingnya berpartisipasi pada Pemilihan Walikota Makassar 2020 menjadi relevan dengan ajaran dalam Gaudium et Spes. Sekalipun langkah dan metode yang dilakukan melalui kanal Youtube, namun demikian cara tersebut sudah dapat dianggap cukup, mengingat situasi pandemi Covid-19. Sebaliknya, Gereja Kristen kelihatan justru lebih terang-terangan menyatakan keberpihakan kepada kandidat tertentu. Terutama kesediaan mereka menerima kandidat di dalam Gereja dan diperkenalkan kepada jemaat sebagaimana yang dilakukan oleh pengurus Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Kota Makassar ketika memperkenalkan Nurdin Halid kepada jemaat sebagai calon gubernur Sulawesi Selatan.

Kata Kunci :

Partisipasi Politik, Gereja, Pemilu

PENDAHULUAN

Tulisan ini berusaha menjelaskan peran Gereja dalam upaya mendorong partisipasi politik warga negara, khususnya warga Makassar. Karena itu, Gereja sebagai institusi agama akan dilihat sejauhmana mengambil peran dalam sistem politik demokratis di Indonesia.

Indonesia yang telah mengamini demokrasi sebagai sistem ideal dalam menjalankan kekuasaan negara, tentu membutuhkan

partisipasi warga negara dalam mengelola urusan-urusan publik. Karena itu partisipasi politik warga negara merupakan keharusan dan semua elemen perlu terlibat dalam memperkuat sistem demokrasi, tidak terkecuali institusi agama. Walau partisipasi politik dibayangkan sebagai hak warga negara, namun pada kenyataannya masih banyak warga negara yang memilih untuk tidak berperan dalam proses politik demokrasi.

Keengganan warga negara mengambil peran dalam proses politik tentu dipengaruhi oleh banyak faktor, misalnya kekecewaan warga negara terhadap pejabat yang tidak becus mengurus urusan publik atau sikap tercela politikus yang dianggap menyimpang dari harapan warga. Di samping itu, akses terhadap informasi politik yang tidak memadai juga dapat memicu absennya partisipasi warga negara dalam proses politik. Biasanya keterbatasan informasi politik yang diperoleh oleh warga negara dikarenakan sosialisasi politik yang tidak maksimal. Begitupun juga tidak maksimalnya kerja-kerja institusi demokratik seperti partai politik untuk mendorong animo masyarakat agar terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik. Selain itu, kesadaran masyarakat berkenaan dengan pentingnya berpartisipasi dalam proses demokrasi juga menjadi kendala.

Tentunya untuk mendorong partisipasi politik masyarakat, semua elemen harus bersinergi. Tidak hanya aktor-aktor demokratik formal, akan tetapi dibutuhkan keterlibatan aktor lain seperti institusi agama, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan komunitas-komunitas lainnya. Karena itu, penelitian ini dilakukan untuk melihat sejauhmana peran aktor-aktor tersebut dalam mendorong partisipasi politik masyarakat. Hanya saja, penelitian ini akan fokus melihat peran dan upaya intitusi Gereja dalam mendorong tingkat partisipasi masyarakat di Kota Makassar.

Pelibatan institusi agama di dalam kerja-kerja demokratis tentu memiliki kendala pada tingkat tertentu, namun juga berguna

pada sisi yang lain. Pandangan sebagian pemeluk agama yang memisahkan antara dunia agama dan politik tentunya menjadi kendala karena berbenturan dengan pahaman teologis mereka. Akan tetapi ketika institusi agama ikut mengambil bagian, justru akan mendorong ketertarikan pengikutnya untuk terlibat dalam politik sebagai perjuangan suci demi kemaslahatan umat.

TINJAUAN PUSTAKA

Sebuah telaah dari Baghi menunjukkan betapa pentingnya keterlibatan Gereja dalam proses sosial politik untuk kepentingan umum. Bagi Baghi, Gereja sebagai intitusi agama tidak boleh berdiri di luar dimensi politik, oleh karenanya Gereja harus mengambil peran dalam negara dengan berkewajiban untuk terlibat dalam proses politik demokrasi demi terwujudnya kebijakan dan keputusan yang berpihak kepada kepentingan orang banyak.¹ Pelibatan ini tentunya tidak hanya terbatas aspek-aspek tertentu, namun secara luas dapat diwujudkan dalam bentuk mendorong jemaat untuk berpartisipasi secara politik dalam proses demokratis.

Senada dengan Baghi, dalam artikelnya *The Church's Role in Politics* (1999), Jim Harris berpendapat bahwa Gereja memiliki peran penting dalam politik dikarenakan ada banyak warga Gereja yang berurusan dengan masalah sosial, politik, dan ekonomi setiap hari. Banyak kebijakan pemerintah yang berhubungan langsung dengan

¹Felix Baghi, *Alteritas: Pengakuan, Hospitalitas, Persahabatan: Etika Politik dan Postmodernisme* (Flores: Ledalero, 2012).

kepentingan warga Gereja. Oleh karena itu, Gereja sebagai tempat bernaung para jemaat tidak dapat menghindar dari persoalan-persoalan yang dihadapi oleh jemaat itu sendiri. Kata Jim Haris, keterlibatan Gereja dalam proses politik merupakan perwujudan dari refleksi iman atas lingkungan sekitarnya.²

Sejalan dengan Jim Haris, Leo Boff sebagaimana dikutip oleh Alexander Jebadu berpendapat bahwa kodrat dari pelayanan Gereja bersifat politik, di mana Gereja akan diperhadapkan pada kenyataan adanya ketidakadilan sosial, pada kondisi itu Gereja tidak boleh apolitis. Gereja harus mengambil peran dan terlibat dalam politik.³

Tiga pandangan sarjana di atas memberikan gambaran bahwa institusi agama perlu mengambil peran dalam proses politik dengan tujuan untuk kepentingan dan kebaikan bersama. Olehnya itu, salah satu peran yang perlu dilakukan adalah bagaimana institusi agama mendorong ummatnya berpartisipasi dalam proses politik.

TINJAUAN TEORETIS

Partisipasi Politik

Bagi masyarakat Barat sebelum abad ke-18, partisipasi politik merupakan barang asing. Pemberian hak yang sama kepada

laki-laki dan perempuan untuk berpartisipasi dalam pemilu yang demokratis baru dimulai pada abad ke-20.⁴ Sementara di Indonesia, kajian tentang pentingnya partisipasi politik semakin menggeliat setelah kejatuhan rezim Orde Baru dan dimulainya proses demokratisasi di Indonesia.

Dalam berbagai kajian literatur, istilah partisipasi politik dipahami dan diberikan pengertian secara beragam. Misalnya saja Sidney Verba dan Norman H. Nie mendefinisikan bahwa partisipasi politik berkaitan dengan berbagai macam aktivitas yang dilakukan oleh individu-individu yang secara langsung bertujuan untuk mempengaruhi pemilihan atau seleksi pejabat publik atau pejabat pemerintahan.⁵ Sementara itu, baik Miriam Budiarjo, Myron Weiner maupun Harbert McClosky mendefinisikannya sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik. Kegiatan politik di sini tidak terbatas pada pemilihan pemimpin negara, namun juga berkaitan dengan bagaimana memengaruhi kebijakan pemerintah.⁶

Dari definisi di atas, maka partisipasi politik dapat dibedakan berdasarkan jumlah pelaku, yakni individual dan kolektif. Partisipasi yang bersifat individual adalah

²Jim Harris, "The Church's Role in Politics" dalam <https://thebigpicture.homestead.com/ChurchinPolitics.html> diakses 10 Februari 2021.

³Alexander Jebadu, "Dimensi Politik dari Misi Pembebasan Gereja Bagi Orang Miskin dan Pemeliharaan Alam Ciptaan", *Jurnal Teologi*, Vol. 06, No. 02 (2017), h. 167-186.

⁴Eko Handoyo, *Sosiologi Politik* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013).

⁵Saiful Mujani, *Muslim Demokrat: Islam, Budaya Demokrasi dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca Orde Baru* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), h. 256.

⁶Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002). Lihat Eko Handoyo, 2013.

kegiatan warganegara secara perseorangan yang terlibat dalam kehidupan politik. Sementara partisipasi kolektif adalah kegiatan warganegara secara serentak untuk mempengaruhi penguasa seperti kegiatan dalam pemilihan umum. Partisipasi kolektif ini dapat dibedakan menjadi dua, yakni; *Pertama*, partisipasi kolektif konvensional, dan; *Kedua*, partisipasi kolektif nonkonvensional (agresif). Bentuk partisipasi kolektif konvensional berupa kegiatan semacam keterlibatan dalam pemilihan umum, sementara partisipasi nonkonvensional seperti pemogokan yang sah, pembangunan warga negara atau huru-hara.⁷

Samuel P. Huntington dan Joan Nelson mengklasifikasikan partisipasi politik dalam dua bentuk, yakni partisipasi otonom dan partisipasi mobilisasi. Partisipasi otonom adalah kegiatan yang oleh pelakunya sendiri dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah, seperti pemberian suara dalam pemilihan umum atau menghubungi pejabat publik atau bergabung dengan organisasi politik. Namun demikian, sekalipun partisipasi yang dilakukan bertujuan untuk mempengaruhi keputusan pemerintah tidak didasarkan pada niat dan inisiatif sendiri, partisipasi tersebut digolongkan ke dalam partisipasi mobilisasi. Jadi yang membedakan antara partisipasi otonom dengan partisipasi mo-

bilisasi terletak pada inisiatif atau penggerakannya.⁸

Dalam penelitian ini, tentu yang dibayangkan adalah keikutsertaan institusi Gereja untuk mendorong jemaatnya ambil bagian dalam politik elektoral, dalam hal ini terlibat dalam peneseleksian pejabat publik melalui pemilihan umum. Keikutsertaan ini mencakup seruan Gereja untuk mencoblos, berkampanye untuk mengajak atau bahkan dukungan terhadap kandidat lain.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan fokus mengkaji literatur yang tersedia. Dalam penelitian ini kami menggunakan dokumen atau literatur yang tersedia sebagai sumber data primer, misalnya jurnal, buku dan berita-berita terkait aktivitas gereja. Berita-berita ini kemudian kami sortir, yang tidak berkaitan dengan politik kami tidak perlakukan sebagai data. Hanya berita yang berkaitan politik yang kemudian kami ambil sebagai basis data. Dalam penelitian ini, kami mengkomparasikan data yang berkaitan dengan Gereja Kristen dan Gereja Katholik untuk melihat kecenderungan keduanya.

PEMBAHASAN

Gereja dan Dinamika Politik

Entitas negara dan Gereja adalah dua hal yang tidak dapat disatukan, akan tetapi pada praktisnya keduanya sulit dipisahkan.

⁷Said A.A. Gatara & Moh Dzulkiah Said, *Sosiologi Politik: Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian* (Bandung: Pustaka Setia, 2007).

⁸Samuel P. Huntington & Joan Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990).

Oleh karenanya, masih sering kita temukan warga Gereja menggunakan atau memanfaatkan persekutuan untuk meraih kekuasaan politik. Begitupun sebaliknya, politisi dengan mengatasnamakan negara mendatangi masyarakat Gereja untuk mendapatkan dukungan politik. Misalnya pada pemilihan presiden 2014, PGPI (Persekutuan Gereja Pantekosta di Indonesia) menerbitkan surat edaran di mana surat tersebut ditandatangani oleh oleh Pdt. Jacob Nahuway. Di dalam surat edaran tersebut berisikan dukungan terhadap Partai Gerindra dan dukungan terhadap Prabowo Subianto sebagai calon presiden kala itu. Surat tersebut dikirim ke seluruh Gereja di bawah PGPI, yang jemaatnya diperkirakan sekitar 12 juta jiwa. Pertimbangan dalam edaran tersebut menyatakan bahwa kepemimpinan nasional harus berlatar belakang militer karena dianggap bahwa Indonesia butuh pemimpin yang kuat dan itu tercermin dari sosok Prabowo Subianto.⁹

Tidak hanya PGPI, GKE (Gereja Kristen Evangelis) sebagai organisasi Gereja Protestan tertua di Kalimantan Tengah juga ikut berpartisipasi dalam proses politik. Beberapa jemaat GKE mencalonkan diri dan mengambil bagian pada pemilu legislatif DPR RI dan DPD RI untuk daerah pemilihan Kalimantan Tengah. Oleh karena itu, GKE tidak hanya terlibat mendorong warga jemaat menggunakan hak politiknya dalam pemungutan suara, tetapi GKE bersikap dan bertindak aktif

memberi dukungan kepada calon dari jemaat GKE. Sikap ini nampak dalam pemilihan DPD RI, di mana GKE menerbitkan surat rekomendasi kepada salah satu calon anggota legislatif DPD RI daerah pemilihan Kalimantan Tengah. Tidak hanya itu, GKE juga menindaklanjuti dengan menggerakkan potensi sumber daya GKE untuk menggalang dukungan dari warga jemaat.¹⁰

Tulisan Mikhael Rajamuda Bataona dan Atwar Bajari tentang Gereja di Nusa Tenggara Timur juga menyebutkan bahwa dalam dua kali Pemilihan Gubernur di Nusa Tenggara Timur dan Pemilihan Bupati dan Wali Kota Kupang, keterlibatan Gereja terutama otoritas Gereja Katolik sangat nyata dalam memberikan dukungan politik terhadap kandidat tertentu. Temuan Bataona dan Bajari didukung oleh testimoni beberapa pihak bahwa dalam pemilihan kepada daerah di banyak kabupaten di Nusa Tenggara Timur, otoritas Gereja juga berpolitik praktis.¹¹

Di Sulawesi Selatan, pasangan Calon Gubernur Nurdin Halid- Abdul Aziz Qahhar Mudzakkar pada Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 2018 juga mendapatkan dukungan langsung dari Sekretaris Umum Badan Pekerja Sinode (BPS) Gereja Tora-

⁹David Ming, "Peranan Gereja dalam Sistem Pemerintahan Yang Baik di Indonesia", *Jurnal Kadesi: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen*, Vol. 1, No. 1 (2021), h. 85-105.

¹⁰Jhon Retei Alfri Sandi, "Perilaku Politik Gereja Kristen Evangelis (GKE) Dalam Pemilihan Umum Legislatif di Kalimantan Tengah Tahun 2019", *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 8, No. 1 (2020), h. 37-61.

¹¹Mikhael Rajamuda Bataona & Atwar Bajari, "Relasi Kuasa dan Simbol-Simbol EKonomi-Politik Gereja Dalam Konstestasi Politik Lokal Provinsi NTT," *Jurnal Kajian Komunikasi*, Vol. 5, No. 2 (2017), h. 121-135.

ja, Suleman Allo Linggi. Suleman Allo Linggi bahkan terang-terangan menyatakan dukungan kepada pasangan tersebut.¹²

Gereja dan Politik: Kasus Makassar

Kehadiran Nurdin Halid sebagai Calon Gubernur Sulawesi Selatan pada perayaan Natal di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Jalan Rajawali Kota Makassar tahun 2018 dan disambut hangat oleh jemaat Gereja HKBP menandakan bahwa Gereja tidak menutup diri dari politik. Bahkan Pendeta HKBP, Pansur Sijabat mengakui sudah saatnya Nurdin Halid maju sebagai pemimpin Sulawesi Selatan.¹³

Begitupun yang dilakukan oleh Bakal Calon Walikota Makassar, Abdul Rachmat Noer yang menemui Pendeta Daud Rupa, Sekretaris Umum Gereja Kibait Klasis Makassar. Pertemuan ini bukan pertemuan biasa, karena Pendeta Daud Rupa berjanji akan membantu Abdul Rachmat Noer untuk diperkenalkan kepada jemaat, sebagaimana disampaikan oleh Pendeta Daud Rupa bahwa "Saya akan membantu Pak Rachmat untuk diperkenalkan kepada jemaat dan akan mengundang untuk menghadiri beberapa kegiatan Gereja."¹⁴

¹²Miftahul Khaeriyah, "Dukung NH-Aziz, Sekertaris BPS Gereja Toraja Titip Tiga Hal" dalam <https://www.merdeka.com/peristiwa/dukung-nh-aziz-sekertaris-bps-Gereja-toraja-titip-tiga-hal.html> diakses 1 Agustus 2021.

¹³Kabar Wirhabuana, "Wow! Pendeta HKBP Puji Komitmen Cagub Sulsel Nurdin Halid" dalam <https://kumparan.com/golkar-celebes/wow-pendeta-hkbp-puji-komitmen-cagub-sulsel-nurdin-halid> diakses 2 Agustus 2021.

¹⁴Asrul, "Jelang Pilwali, Rachmat Noer Temui Pendeta Gereja Kibait" dalam <https://www.sulselsatu.com/2019/08/07/politik/jelang-pilwali-rachmat-noer-temui-pendeta-gereja-kibait-%E2%80%8B.html> diakses 2 Agustus 2021.

Pada kasus yang lain, Komisi Kepemudaan Keuskupan Agung Makassar melalui kanal Youtube *Komkep Kams Official* yang diikuti sekitar 1.300-an *subscribers* melakukan sosialisasi politik yang mengajak pemuda dan masyarakat Kota Makassar untuk berpartisipasi pada Pemilihan Walikota Makassar 2020. Komisi Kepemudaan Keuskupan Agung Makassar menggunakan hastag #OMKAntiGolput yang menandakan bahwa mereka mendorong agar masyarakat tidak "golput" pada Pemilihan Walikota Makassar 2020.

Sementara itu, ketika kami melakukan wawancara kepada Theobaldus Hemma, Ketua Umum PMKRI Sanctus Albertus Magnus terkait keterlibatan Pastor atau pengurus Gereja dalam proses sosialisasi politik kepada jemaat, Theobaldus Hemma mengatakan bahwa "*Sejauh ini saya belum menemukan baik Pastor atau Romo di setiap Gereja yang mendorong partisipasi politik di dalam Gereja. Tapi di luar Gereja mungkin ada, kalau di dalam Gereja mereka punya tupoksi sendiri, mereka lurus membahas moral di Gereja. Makanya, umat kristiani tidak menunjukkan eksistennya pada urusan duniawi dan politik praktis Gereja secara umum karena mengacu pada hierarki Gereja. Kota Makassar misalnya, kenapa sampai kemudian keuskupan agung Makassar tidak menyampaikan ke masyarakat memilih salah satu calon, karena urusan Gereja adalah urusan hierarki. Nah, untuk misalkan khutbah itu tergantung dari penafsiran kitab*

[rachmat-noer-temui-pendeta-gereja-kibait-%E2%80%8B.html](https://www.sulselsatu.com/2019/08/07/politik/jelang-pilwali-rachmat-noer-temui-pendeta-gereja-kibait-%E2%80%8B.html) diakses 2 Agustus 2021.

suci pada pasal-pasalnya masing-masing. Kalau dalam ibadah tidak ada."¹⁵ Begitu pun KPU sebagai penyelenggara Pemilu, belum pernah ke Gereja untuk mensosialisasikan Pemilu kepada jemaat.

Dari pemaparan tersebut jelas bahwa sekalipun dalam ajaran Gereja tidak dapat disatukan antara agama dan negara/politik sebagaimana termaktub pada *Gaudium et Spes* (GS) yang menyatakan bahwa, "*berdasarkan tugas juga wewenangnya Gereja sama sekali tidak bisa dicampuradukkan dengan negara, serta tidak terikat pada sistem politik mana pun juga*" (GS. 76).¹⁶ Namun pada kenyataannya Gereja juga tidak bisa lepas dari tanggungjawab sosialnya dalam hal memperbaiki kondisi masyarakat, salah satunya melalui peran aktif dalam dunia politik tanpa memihak pada kandidat tertentu.

Wewenang Gereja dan negara memang tidak dapat dicampuradukan, tetapi Gereja mempunyai kewajiban untuk bekerja sama dengan negara dalam rangka mewujudkan cinta kasih dan keadilan. Terkait dengan hal itu, dokumen GS menyatakan bahwa, "*Gereja, yang bertumpu pada cinta kasih sang penebus, menyumbangkan bantuannya, supaya di dalam kawasan bangsa sendiri dan antara bangsa-bangsa makin meluaslah keadilan dan cinta kasih. Denganewartakan kebenaran injil, dan dengan menyinari semua bidang manusiawi*

¹⁵Theobaldus Hemma, Ketua Umum PMKRI Sanctus Albertus Magnus, wawancara, 3 September 2021.

¹⁶Antonius Beny Wijayanto, dkk., *Peran Serta Umat Katolik Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Berkualitas* (Jakarta: Bawaslu RI, 2018).

melalui ajaran-nya dan melalui kesaksian umat kristen, Gereja juga menghormati dan mengembangkan kebebasan serta tanggung jawab politik para warganegara." (GS. 76). Dari dokumen itu jelas bahwa negara dan Gereja mempunyai tujuan yang sama yaitu membangun manusia secara utuh.¹⁷

Dengan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu, sudah menunjukkan kepedulian Gereja dalam memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia. Sebagaimana yang dilakukan oleh Komisi Kepemudaan Keuskupan Agung Makassar yang mendorong partisipasi politik melalui kanal Youtube mereka.

KESIMPULAN

Agama dan negara/politik sejauh ini masih menjadi perdebatan banyak kalangan. Sebagian berpendapat bahwa agama pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dengan negara atau politik. Sebaliknya berpandangan bahwa agama harus dijauhkan dengan dinamika politik praktis karena keduanya berbeda. Agama dipandang sebagai urusan privat yang bersifat transenden, sementara politik adalah ranah publik yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Sehingga keduanya tidak dapat disatukan.

Di Makassar, sekalipun Gereja Katolik tidak menyatakan sikap politik secara jelas dan berpihak kepada kandidat tertentu, akan tetapi upaya mereka terutama dari Komite Kepemudaan Keuskupan Agung

¹⁷Antonius Beny Wijayanto, dkk., 2018.

Makassar yang mensosialisasikan pentingnya berpartisipasi pada Pemilihan Walikota Makassar 2020 menjadi relevan dengan ajaran dalam *Gaudium et Spes*. Sekalipun langkah dan metode yang dilakukan melalui kanal Youtube, namun demikian cara tersebut sudah dapat dianggap cukup mengingat situasi pandemi Covid-19.

Sebaliknya, Gereja Kristen kelihatan justru lebih terang-terangan menyatakan keberpihakan kepada kandidat tertentu. Terutama kesediaan mereka menerima kandidat di dalam Gereja dan diperkenalkan kepada jemaat sebagaimana yang dilakukan oleh pengurus Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Kota Makassar ketika memperkenalkan Nurdin Halid kepada jemaat sebagai calon gubernur Sulawesi Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

Alexander Jebadu, "Dimensi Politik Dari Misi Pembebasan Gereja Bagi Orang Miskin dan Pemeliharaan Alam Ciptaan", *Jurnal Teologi*, Vol. 06, No. 02 (2017), h. 167-186.

Antonius Beny Wijayanto, dkk., *Peran Serta Umat Katolik Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Berkualitas* (Jakarta: Bawaslu RI, 2018).

David Ming, "Peranan Gereja dalam Sistem Pemerintahan Yang Baik di Indonesia", *Jurnal Kadesi: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen*, Vol. 1, No. 1 (2021), h. 85-105.

Eko Handoyo, *Sosiologi Politik* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013).

Felix Baghi, *Alteritas: Pengakuan, Hospitalitas, Persahabatan: Etika Politik dan Postmodernisme* (Flores: Ledalero, 2012).

Jhon Retei Alfri Sandi, "Perilaku Politik Gereja Kristen Evangelis (GKE) Dalam Pemilihan Umum Legislatif di Kalimantan Tengah Tahun 2019", *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 8, No. 1 (2020), h. 37-61.

Mikhael Rajamuda Bataona & Atwar Bajari, "Relasi Kuasa dan Simbol-Simbol Ekonomi-Politik Gereja dalam Konstestasi Politik Lokal Provinsi NTT," *Jurnal Kajian Komunikasi*, Vol. 5, No. 2 (2017), h. 121-135.

Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002).

Said A.A. Gatara & Moh Dzulkiah Said, *Sosiologi Politik: Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian* (Bandung: Pustaka Setia, 2007).

Saiful Mujani, *Muslim Demokrat: Islam, Budaya Demokrasi dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca Orde Baru* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007).

Samuel P. Huntington & Joan Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990).

Website

Asrul, “Jelang Pilwali, Rachmat Noer Temui Pendeta Gereja Kibait” dalam <https://www.sulselsatu.com/2019/08/07/politik/jelang-pilwali-rachmat-noer-temui-pendeta-Gereja-kibait-%E2%80%8B.html> diakses 2 Agustus 2021.

Jim Harris, “The Church’s Role in Politics” dalam <https://thebigpicture.homestead.com/ChurchinPolitics.html> diakses 10 Februari 2021.

Kabar Wirhabuana, “Wow! Pendeta HKB-P Puji Komitmen Cagub Sulsel Nurdin Halid” dalam <https://kumparan.com/golkar-celebes/wow-pendeta-hkbp-puji-komitmen-cagub-sulsel-nurdin-halid> diakses 2 Agustus 2021.

Miftahul Khaeriyah, “Dukung NH-Aziz, Sekertaris BPS Gereja Toraja Titip Tiga Hal” dalam <https://www.merdeka.com/peristiwa/dukung-nh-aziz-sekertaris-bps-Gereja-toraja-titip-tiga-hal.html> diakses 1 Agustus 2021.

Wawancara

Theobaldus Hemma, Ketua Umum PMKRI Sanctus Albertus Magnus, *wawancara*, 3 September 2021.